

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ateng Syafrudin, 1976, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, dikutip dalam Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat, 2021, "Kecamatan Gunung Tuleh Dalam Angka 2021", Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat.
- Chabib Sholeh dan Heru Rochansjah, 2014, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokus Media, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijawa, 2007, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP RPDN), Jakarta.
- Eddie Praptono dan Soesi Idayanti, 2020, *Hukum Perusahaan*, Tanah Air Beta, Yogyakarta.
- Ibrahim Dt.Sanggoenodiradjo, 2009, *Tambo Alam Minangkabu Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Kristal Multimedia, Bukittnggi.
- Isharyanto dan Dila Eka, 2016, *Hukum Pemerintahan Desa*, Absolute Media, Bantul.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.
- Kurnia Warman, 2010, *Hukum agraria dalam masyarakat majemuk: Dinamika interaksi hukum adat dan hukum negara di Sumatra Barat*, HuMa, Jakarta.
- M. Yamin, 1971, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, dalam Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad Mu'iz Raharjo, 2021, *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa (Teori, Regulasi dan Implementasi)*, Rajawali Pers, Depok.
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang.

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Robert Bierstedt , 1950, *An Analysis of Social Power*, diambil dari Miriam Budiarmo, 2019, *Dasar-Dasar Ilmu Politik-Ed.rev.-Cet.16*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sadjijono, 2020, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi-ed.3.-cet.3.*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

Soetardjo Kartohadikoesomo, 1984, *Desa* , Balai Pustaka, Jakarta.

Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik-Ed. 1, Cet. 3*, Rajawali Pers, Depok.

Yuliandre Darwis, 2013, *Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yusnani Hasyimzoem,dkk, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.

Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja..

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Nagari;

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari.

### **C. Jurnal**

Ade Kokasih, 2016, "Format Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Al Ijarah*, Volume 1 Nomor 1, 2016.

Alda Rifada Rizki, 2019, "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 2019.

Dodi Faedlulloh, 2018, "BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris", *Journal of Governance*, Volume 3, Nomor 1, 2018.

Shara Mitha Mahfirah dan Adista Paramita, 2021, "Kajian Normatif Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Subyek Hukum", *Notaire* , Volume 4 Nomor 1, 2021.

Steven Federik dan Tjempaka, 2021, "Pendirian BUMDes Dengan Akta Notaris Berbadan Hukum Perkumpulan", *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 19, Nomor 1, 2021.

### **D. Website**

Pendapatan Asli Nagari Konsep Definisi, <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/6445> , dikunjungi pada 6 Juni 2022 pukul 11.05 WIB.

Arti Kata Bentuk-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/bentuk> , dikunjungi pada 28 Juli 2022 pukul 11.40 WIB.

Bupati pasaman barat kukuhkan perangkat nagari persiapan gunung tuleh, <https://sumbar.antaranews.com/amp/berita/210280/bupati-pasaman-barat-kukuhkan-perangkat-nagari-persiapan-gunung-tuleh>, diakses pada 18 Agustus 2022 pukul 17.24 WIB.

Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa, <https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/> , dikunjungi pada 24 September 2022 pukul 14.30 WIB.

Arti Kata Wenang-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/wenang.html>, dikunjungi pada 1 Oktober 2022 pukul 13.50 WIB.

<https://bumdes.kemendes.go.id/home>, dikunjungi pada 6 Oktober 2022 pukul 15.39 WIB.

## **E. Wawancara**

Adra Bomi, Wawancara, tanggal 20 Agustus 2022, di Kantor Badan Permasyarakatan Nagari Muaro Kiawai.

Fitriani, Wawancara, tanggal 19 Agustus 2022, di Rumah usaha BUM Nag Kenaikan Ingin Bersama Muaro Kiawai.

Hasdim, Wawancara, 20 Agustus 2022, melalui sambungan telepon.

Merlinda Agustini, Wawancara, tanggal 29 September 2022, di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat.

Nofitra, Wawancara, 6 Oktober 2022, melalui sambungan telepon.

Roni Siswanto, Wawancara, tanggal 19 Agustus 2022, di Kantor Wali Nagari Muaro Kiawai.